

**READINESS DESA DIGITAL:
STUDI DI DESA TUMBANG PENYAHUAN**

ARTIKEL

*Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarana Strata Satu (S1)*



**DISUSUN OLEH:
SETIANINGSIH
NIM. 223010702014**

**ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL JURNAL ILMIAH

Nama : Setianingsih
NIM : 223010702014
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Artikel : *Readiness* Desa Digital: Studi di Desa Tumbang Penyahuan

Disetujui,
Palangka Raya, 2 Juni 2026
Menyetujui,

Pembimbing I



Supravito, S.A.N., M.A.P.
NIP. 199001012018031001
Tanggal: 2 Juni 2026

Pembimbing II



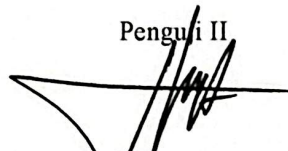
Subhan Ilham Thareq, S.IP., MPA
NIP. 199307122023211027
Tanggal: 2 Juni 2026

Penguji I



Immanuel Java, S.A.P., M.A.P.
NIP. 198109242008121004
Tanggal: 2 Juni 2026

Penguji II



Yonatan Ari Santoso, S.S., M.A.P.
NIP. 199105042022031005
Tanggal: 2 Juni 2026

Mengetahui,



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Palangka Raya

Kor. Bhayu Rhama, S.T., MBA. Ph.D.
NIP. 197901052010121001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Setianingsih
NIM : 223010702014
Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Artikel saya yang berjudul: "*Readiness* Desa Digital: Studi di Desa Tumbang Penyahuan", merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Tugas Akhir Jurnal/Artikel ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima segala konsekuensi sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya.

Palangka Raya, 2 Juni 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Setianingsih

NIM. 223010702014

IDENTITAS ARTIKEL ILMIAH

1. Judul Artikel : *Readiness* Desa Digital: Studi di Desa Tumbang Penyahuan
2. Nama : Jurnal Administrasi Publik (JPAP)
3. ISSN : e-ISSN: [2777-0206](#) & p-ISSN: [2776-8511](#)
4. Akreditasi Jurnal : Nasional/ SINTA 5
5. Tautan DOI/Artikel : <https://doi.org/10.37090/9haj5y04>
<https://jurnal.utb.ac.id/index.php/jpap/article/view/3470>
6. Kode QR :



READINESS DESA DIGITAL: STUDI DI DESA TUMBANG PENYAHUAN

Setianingsih^{1*)}, Bagas Rizky Ardiansyah²⁾, Suprayitno³⁾, Subhan Ilham Thareq⁴⁾

(e-mail: setianingsih.stn@gmail.com¹⁾)

(*) Corresponding Author

1), 2), 3), 4) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Palangka Raya

ABSTRACT

This study aims to analyze the readiness for digital village implementation in Tumbang Penyahuan Village using the Readiness for Change framework, which encompasses individual, organizational, and structural dimensions. The study employed a qualitative approach with a single case study design to gain a contextual understanding of the dynamics of digitalization at the village level. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation with seven key informants. From the individual dimension, village officials possess basic skills and positive attitudes toward digitalization, but are still limited to administrative operational use. From the organizational dimension, digitalization has driven increased coordination and work efficiency, although it has not yet been fully integrated into the organizational culture. From the structural dimension, digital infrastructure is relatively available, but its effectiveness depends on electricity stability. These findings suggest that the primary constraint is not infrastructure availability, but rather human resource capacity and organizational integration. Theoretically, this study reinforces the argument that readiness is not solely technical, but rather a multidimensional construct influenced by interactions between actors, organizations, and systems. Practically, the results emphasize the importance of strengthening digital competencies and institutional integration strategies in digital village implementation.

Keywords: , Digitalization; Digital Village; Governance; Readiness For Change

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan implementasi desa digital di Desa Tumbang Penyahuan dengan menggunakan kerangka Readiness for Change yang mencakup dimensi individu, organisasi, dan struktural. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal untuk memperoleh pemahaman kontekstual terhadap dinamika digitalisasi di tingkat desa. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap tujuh informan kunci. Pada dimensi individu, aparatur desa memiliki kemampuan dasar dan sikap positif terhadap digitalisasi, namun masih terbatas pada penggunaan operasional administratif. Pada dimensi organisasi, digitalisasi mendorong peningkatan koordinasi dan efisiensi kerja, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi dalam budaya organisasi. Pada dimensi struktural, infrastruktur digital relatif tersedia, tetapi efektivitasnya bergantung pada stabilitas listrik. Temuan ini menunjukkan bahwa kendala utama bukan pada ketersediaan infrastruktur, melainkan pada kapasitas sumber daya manusia dan integrasi organisasi. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat argumen bahwa readiness tidak hanya bersifat teknis, tetapi merupakan konstruksi multidimensi yang dipengaruhi interaksi antara aktor, organisasi, dan sistem. Secara praktis, hasil penelitian menegaskan pentingnya penguatan kompetensi digital dan strategi integrasi kelembagaan dalam implementasi desa digital.

Kata Kunci: Desa Digital; Digitalisasi; Kesiapan Perubahan; Pemerintahan Desa

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah, termasuk desa,

yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Ketentuan ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan bagi desa

dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri, transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mendorong percepatan transformasi digital desa sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi. Kebijakan ini tercermin dalam regulasi Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 dan Nomor 7 Tahun 2023 yang menekankan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital (Kementerian Desa PDTT, 2023).

Namun demikian, implementasi kebijakan digitalisasi desa tidak selalu berjalan secara linier di tingkat lapangan. Keberhasilan program desa digital sangat ditentukan oleh tingkat *readiness* (kesiapan) desa dalam menerima perubahan, baik dari sisi sumber daya manusia, kelembagaan, maupun infrastruktur (Armenakis *et al.*, 1993). *Readiness* merupakan suatu kondisi psikologis dan organisasi yang memungkinkan suatu institusi siap mengimplementasikan inovasi atau perubahan struktural. Tanpa *readiness* yang memadai, digitalisasi desa hanya akan menjadi tindakan administrasi biasa tanpa manfaat signifikan.

Sejumlah penelitian menegaskan pentingnya *readiness* sebagai prasyarat dalam digitalisasi desa. Menurut (Mayyora *et al.*, 2025) transformasi digital desa harus didukung oleh kesiapan teknologi, kapasitas lokal, dan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan pembangunan yang inklusif. (Wibisono *et al.*, 2021) menambahkan literasi digital masyarakat desa yang masih rendah menjadi kendala utama, sehingga diperlukan pendekatan yang berkelanjutan untuk mendukung pelatihan dan pendampingan aparatur.

Penelitian lain oleh (Daud *et al.*, 2025) menyatakan bahwa kemampuan perangkat desa dan keterlibatan masyarakat mempengaruhi kualitas pengelolaan keuangan desa, sehingga *readiness* aparatur harus dianggap sebagai komponen utama keberhasilan tata kelola. Sementara itu, (Wardana *et al.*, 2025) menyatakan bahwa digitalisasi memiliki kemampuan untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, namun juga dapat berpotensi memperlebar kesenjangan yang baru apabila *readiness* antarwilayah tidak merata.

Temuan serupa dikemukakan oleh (Rahmawati & Suharto, 2024), yang melakukan analisis terhadap kesiapan aparatur desa di Kecamatan Manyaran menggunakan kerangka STOPE. Penelitian mereka menunjukkan bahwa aparatur desa cukup siap dalam menerapkan digitalisasi, tetapi masih menghadapi tantangan yang cukup signifikan seperti lemahnya integrasi digital dalam pembangunan, keterbatasan infrastruktur jaringan, serta kurangnya kerja sama antar organisasi.

Selain itu, (Andriyus *et al.*, 2024) dalam penelitian mereka di Kabupaten Bengkalis juga menemukan bahwa kesiapan pemerintah desa dalam menghadapi era digital masih tergolong rendah, khususnya pada aspek sumber daya manusia dan infrastruktur jaringan internet. Hasil ini mendukung argumen bahwa *readiness* tidak hanya dipengaruhi faktor teknis, tetapi juga oleh kemampuan adaptasi dan kepemimpinan lokal yang menentukan keberlanjutan inovasi digital di desa. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi membutuhkan kombinasi kesiapan psikologis, organisasional, dan teknis yang seimbang. Lebih lanjut, (Yunas *et al.*, 2024) menekankan pentingnya digital *leadership* dalam meningkatkan kemampuan aparatur desa. Tanpa kepemimpinan yang visioner dan kemampuan mengelola perubahan, upaya digitalisasi cenderung bersifat administratif semata dan tidak berkelanjutan. Dengan demikian, aspek

kepemimpinan menjadi dimensi penting dari kesiapan organisasi dalam teori *Readiness for Change*.

Selain faktor internal organisasi, keberhasilan digitalisasi desa juga dipengaruhi oleh dukungan ekosistem eksternal seperti infrastruktur jaringan, pendampingan pemerintah, dan tingkat literasi digital masyarakat keterbatasan akses teknologi dan rendahnya kemampuan pemanfaatan sistem digital dapat menyebabkan implementasi digitalisasi berjalan tidak optimal (Mayyora *et al.*, 2025;) Wibisono *et al.*, 2021). Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur dan dukungan kelembagaan menjadi faktor dalam mendorong keberlanjutan transformasi digital di tingkat desa.

Desa Tumbang Penyahuan, yang terletak di Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur, merupakan salah satu desa yang sedang berada dalam proses adaptasi terhadap kebijakan digitalisasi pemerintahan desa. Sebagai desa yang memiliki karakteristik geografis perdesaan dan keterbatasan akses infrastruktur tertentu, Desa Tumbang Penyahuan menghadapi tantangan khusus dalam penerapan sistem digital pemerintahan. Kondisi ini menjadikan desa tersebut relevan sebagai studi kasus untuk memahami bagaimana kesiapan desa dalam menghadapi transformasi digital dijalankan pada level paling dasar pemerintahan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menekankan aspek parsial seperti infrastruktur atau literasi digital, penelitian ini mengkaji kesiapan desa secara integratif menggunakan kerangka *Readiness for Change* yang menggabungkan dimensi individu, organisasi, dan struktural dalam satu analisis.

Selain itu, sebagian besar studi terdahulu masih dilakukan pada level makro atau antarwilayah, sehingga masih terbatas dalam menjelaskan dinamika kesiapan pada level mikro pemerintahan desa. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian berupa

minimnya studi yang mengkaji kesiapan digital secara kontekstual dan mendalam pada satu desa spesifik dengan pendekatan integratif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesiapan digital Desa Tumbang Penyahuan secara komprehensif berdasarkan dimensi individu, organisasi, dan struktural, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi proses transformasi digital di tingkat desa.

Penelitian ini meneliti sejauh mana tingkat kesiapan digital Desa Tumbang Penyahuan dengan menggunakan kerangka *Readiness for Change* yang mencakup kesiapan individu, kesiapan organisasi, dan kesiapan struktural. Dengan fokus pada satu desa memungkinkan penelitian ini dapat mengeksplorasi secara mendalam dinamika yang terjadi di desa ketika menghadapi perubahan digital, sekaligus mengurangi risiko pembuatan kesimpulan umum yang terlalu luas dan sering muncul dalam penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal. Desain ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam dan kontekstual kesiapan digital Desa Tumbang Penyahuan sebagai satu kesatuan organisasi pemerintahan desa, bukan untuk melakukan generalisasi statistik. Sejalan dengan pandangan (Yin, 2018), pendekatan studi kasus digunakan ketika peneliti ingin mengkaji fenomena yang terjadi saat ini dalam konteks kehidupan nyata, khususnya ketika batas antara fenomena itu sendiri dan konteksnya tidak begitu jelas.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Tumbang Penyahuan. Informan ditentukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung aparatur desa dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan digitalisasi pemerintahan desa. Penelitian ini melibatkan

tujuh informan yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, operator sistem informasi desa, kasi pemerintahan desa, kasi kesejahteraan dan pelayanan, dan kaur umum dan perencanaan. Komposisi informan tersebut dipilih untuk merepresentasikan fungsi strategis, manajerial, dan operasional dalam struktur pemerintahan desa, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh gambaran kesiapan digital secara menyeluruh.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali persepsi dan pengalaman aparatur desa terkait kesiapan individu, kesiapan organisasi, dan kesiapan struktural dalam digitalisasi. Observasi dilakukan untuk memahami praktik penggunaan teknologi dalam aktivitas pemerintahan desa sehari-hari, sementara studi dokumentasi bertujuan untuk mempelajari peraturan desa dan dokumen pendukung penerapan sistem digital.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis, yaitu: (1) reduksi data dengan mengidentifikasi informasi relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi; (2) pengkodean terbuka untuk mengelompokkan data berdasarkan tema awal; (3) kategorisasi data sesuai dengan tiga dimensi *Readiness for Change* (individu, organisasi, struktural); (4) interpretasi data dengan mengaitkan temuan empiris dengan kerangka teori dan penelitian terdahulu; serta (5) penarikan kesimpulan secara analitis. Proses ini dilakukan secara iteratif untuk memastikan konsistensi dan kedalaman analisis.

III. PEMBAHASAN

Kesiapan Individu Aparatur Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur Desa Tumbang Penyahuan pada dasarnya telah menunjukkan kesiapan awal dalam menghadapi proses digitalisasi pemerintahan desa. Aparatur desa tidak menolak terhadap penggunaan sistem digital dan memahami

bahwa digitalisasi adalah bagian dari kebijakan pemerintah yang harus dijalankan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi desa. Aparatur desa telah mampu menggunakan sistem digital yang digunakan dalam urusan pemerintahan, terutama dalam menginput data dan membuat laporan.

Kepala desa menjelaskan bahwa digitalisasi memberikan manfaat bagi pelayanan administrasi di wilayah perdesaan yang mengalami keterbatasan akses. Dengan adanya sistem digital, proses komunikasi administrasi bisa dilakukan lebih cepat dan dapat mengurangi pengeluaran biaya transportasi yang sebelumnya diperlukan untuk mengurus administrasi ke tingkat pemerintahan di atasnya. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi mulai memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik di tingkat desa.

Meskipun begitu, kemampuan aparatur desa dalam menggunakan teknologi masih berada pada tahap teknis operasional. Aparatur desa umumnya hanya menggunakan sistem digital untuk memenuhi kebutuhan administrasi harian, sementara pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengelolaan data, perencanaan pembangunan, dan pengambilan keputusan belum berkembang dengan baik. Kepala desa juga menekankan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa masih menjadi kebutuhan utama agar pemanfaatan teknologi digital dapat berjalan secara lebih efektif.

Dalam perspektif *Readiness for Change* (Armenakis *et al.*, 1993), kondisi ini menunjukkan bahwa aparatur desa telah memiliki penerimaan awal terhadap perubahan digital, namun pemanfaatan teknologi masih terbatas pada kebutuhan administratif operasional. Digitalisasi belum sepenuhnya dipahami sebagai instrumen strategis dalam mendukung pengambilan keputusan, pengelolaan data, dan transformasi tata kelola pemerintahan desa.

Temuan ini sejalan dengan (Wibisono *et al.*, 2021) yang menunjukkan bahwa literasi digital aparatur desa umumnya masih berada pada level dasar. Namun, temuan penelitian ini memiliki perbedaan dengan (Andriyus *et al.*, 2024) yang menemukan rendahnya kesiapan aparatur desa, karena dalam konteks Desa Tumbang Penyahuan, terdapat sikap penerimaan yang relatif positif terhadap digitalisasi meskipun belum diikuti oleh peningkatan kapasitas yang memadai.

Kesiapan Organisasi Pemerintahan Desa. Pada dimensi organisasi, penerapan sistem digital mulai memengaruhi cara kerja dan koordinasi antar perangkat desa. Digitalisasi mendorong perangkat desa untuk bekerja lebih terkoordinasi karena setiap proses administrasi saling berkaitan dalam sistem yang digunakan. Keterlambatan atau kesalahan pada satu bagian dapat mempengaruhi proses administrasi secara keseluruhan.

Peran kepemimpinan desa juga menjadi faktor penting dalam proses adaptasi organisasi terhadap digitalisasi. Berdasarkan hasil wawancara, kepala desa tidak hanya memerintahkan kepada perangkat desa untuk menggunakan sistem digital, tetapi juga mengawasi langsung terhadap pelaksanaan tugas serta mengevaluasi terhadap hasil kerja aparatur desa. Apabila perangkat desa mengalami kendala dalam penggunaan sistem digital, pemerintah desa berupaya mencari solusi secara bersama melalui diskusi dengan perangkat desa lain yang memiliki pemahaman lebih terhadap sistem tersebut. Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya kepemimpinan yang partisipatif dalam mendorong adaptasi organisasi terhadap perubahan berbasis teknologi.

Meskipun demikian, digitalisasi belum sepenuhnya terintegrasi dalam budaya kerja organisasi pemerintahan desa. Dalam beberapa kondisi, pekerjaan administrasi masih dilakukan secara konvensional ketika sistem mengalami kendala teknis. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi masih

berjalan berdampingan dengan metode kerja sebelumnya dan belum sepenuhnya menjadi sistem kerja utama dalam tata kelola pemerintahan desa.

Dalam kerangka *Readiness for Change*, kondisi ini menunjukkan bahwa organisasi pemerintahan desa mulai beradaptasi terhadap perubahan digital melalui penyesuaian prosedur kerja dan koordinasi internal. Namun demikian, integrasi digitalisasi dalam budaya kerja organisasi masih berlangsung secara bertahap sehingga penggunaan teknologi belum sepenuhnya menjadi bagian utama dalam tata kelola pemerintahan desa.

Temuan ini sejalan dengan (Andriyus *et al.*, 2024) yang menyatakan bahwa integrasi digital dalam organisasi pemerintahan desa cenderung bersifat parsial. Namun, berbeda dengan (Rahmawati & Suharto, 2024) yang menekankan kendala pada aspek infrastruktur dan koordinasi, penelitian ini menemukan bahwa faktor kepemimpinan partisipatif justru menjadi kekuatan dalam mendorong adaptasi organisasi, meskipun belum cukup untuk menciptakan transformasi yang menyeluruh.

Kesiapan Struktural dan Infrastruktur Digital. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, secara umum infrastruktur digital di Desa Tumbang Penyahuan telah tersedia dan cukup mendukung pelaksanaan digitalisasi pemerintahan desa. Jaringan internet sudah dapat digunakan untuk operasional sistem administrasi desa serta pengelolaan keuangan desa. Aparatur desa menyampaikan bahwa selama pasokan listrik dalam kondisi stabil, sistem digital dapat diakses dengan baik dan proses pekerjaan administrasi dapat dilakukan dengan lancar. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi desa sangat bergantung pada stabilitas infrastruktur dasar seperti listrik dan jaringan internet.

Dalam praktiknya, kendala teknis sesekali masih terjadi, terutama ketika terjadi gangguan listrik atau ketidakstabilan jaringan. Namun secara umum kondisi tersebut tidak

menjadi hambatan utama dalam penggunaan sistem digital karena pekerjaan dapat kembali dilanjutkan setelah jaringan dan listrik kembali stabil. Di sisi lain, pemerintah desa juga menerima dukungan dari pemerintah daerah melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan yang dilakukan secara berkala. Pendampingan tersebut membantu aparatur desa dalam memahami penggunaan sistem digital serta mengatasi kendala teknis yang muncul dalam pelaksanaannya. Selain itu, masyarakat desa juga memberikan respon yang cukup positif terhadap penerapan digitalisasi karena dinilai dapat mempermudah proses administrasi yang mereka lakukan.

Temuan ini menunjukkan bahwa infrastruktur bukan merupakan faktor pembatas utama dalam implementasi digitalisasi pemerintahan desa di Desa Tumbang Penyahuan. Tantangan yang lebih menonjol justru berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi oleh aparatur desa. Dengan kata lain, dukungan infrastruktur pada dasarnya telah tersedia, namun pemanfaatannya masih memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia agar sistem digital dapat digunakan secara lebih maksimal.

Temuan ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya (misalnya ([Andriyus et al., 2024](#))) yang menempatkan infrastruktur sebagai hambatan utama. Dalam konteks Desa Tumbang Penyahuan, infrastruktur bukan merupakan kendala dominan, melainkan faktor pendukung yang masih memerlukan penguatan dari sisi stabilitas dan keberlanjutan.

Berdasarkan ketiga dimensi yang dianalisis, kesiapan digital Desa Tumbang Penyahuan merupakan hasil interaksi antara kapasitas individu, dinamika organisasi, dan dukungan struktural. Ketiga dimensi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi dalam menentukan tingkat kesiapan digital desa secara keseluruhan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa

meskipun infrastruktur relatif tersedia dan organisasi mulai beradaptasi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci yang menghambat optimalisasi digitalisasi. Hal ini menegaskan bahwa kesiapan digital tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan sebagai sistem yang bersifat integratif.

Dalam perspektif teoretis, temuan ini memperluas pemahaman tentang *Readiness for Change* dengan menunjukkan bahwa kesiapan dalam konteks digitalisasi desa bersifat multidimensional dan dinamis, serta sangat dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal dan eksternal. Dengan demikian, pendekatan yang hanya menekankan pada satu dimensi (misalnya infrastruktur) tidak cukup untuk menjelaskan keberhasilan digitalisasi.

Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengembangan desa digital harus dilakukan secara komprehensif, meliputi peningkatan kapasitas aparatur, penguatan integrasi organisasi, serta perbaikan kualitas infrastruktur. Tanpa pendekatan yang terintegrasi, digitalisasi berpotensi hanya menjadi alat administratif, bukan sebagai instrumen transformasi tata kelola pemerintahan desa.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesiapan digital Desa Tumbang Penyahuan secara umum berada pada tingkat cukup siap dalam menghadapi implementasi digitalisasi pemerintahan desa. Hal ini terlihat dari adanya dukungan infrastruktur teknologi, penerimaan aparatur desa terhadap penggunaan sistem digital, serta mulai terintegrasinya penggunaan teknologi dalam aktivitas administrasi dan pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperkuat perspektif bahwa *Readiness for Change* dalam konteks digitalisasi desa merupakan konstruksi multidimensi yang tidak hanya ditentukan oleh faktor

teknis, tetapi juga oleh interaksi antara kapasitas individu, dinamika organisasi, dan dukungan struktural. Secara praktis, penelitian ini menegaskan pentingnya strategi penguatan kompetensi digital dan integrasi sistem dalam tata kelola pemerintahan desa.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggunaan desain studi kasus tunggal sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi secara luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan komparatif antar desa untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai variasi kesiapan digital di berbagai konteks wilayah.

Berdasarkan temuan penelitian, pemerintah desa perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan dalam pengelolaan sistem informasi dan literasi digital. Peningkatan kapasitas ini penting agar aparatur desa tidak hanya mampu mengoperasikan sistem secara teknis, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi secara lebih strategis dalam pengelolaan data, perencanaan pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

Selanjutnya, pemerintah daerah dan instansi terkait perlu memperkuat dukungan infrastruktur digital di wilayah perdesaan, khususnya terkait stabilitas jaringan internet, ketersediaan perangkat teknologi, serta dukungan teknis bagi desa. Dukungan tersebut menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan implementasi program digitalisasi pemerintahan desa, terutama bagi desa yang memiliki keterbatasan akses teknologi. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan lebih dari satu desa atau menggunakan pendekatan komparatif antarwilayah. Pendekatan tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai variasi kesiapan digital desa serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi

digitalisasi pemerintahan desa di berbagai konteks wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyus, Yusraini, N., Arsy, M., Shiddiqy, A., & Safitri, B. H. (2024). Village Government Challenges Facing Technological Advances: Readiness for the digital era in Bengkalis Village, Riau Province, Indonesia. *KEMUDI: Journal of Government Science*, 8(2), 17–29.
- Armenakis, A. A., Harris, S. G., & Mossholder, K. W. (1993). Creating readiness for organizational change. *Human Relations*, 46(6), 681–703.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur. (2024). Kabupaten Kotawaringin Timur dalam angka 2024. BPS.
- Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). SAGE Publications.
- Daud, Y. M., Hinele, R., & Podungge, R. (2025). Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 8(1), 260–271.
<https://doi.org/10.37479/jimb.v8i1.32001>
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2023a). Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemendes PDTT.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2023b). Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang prioritas penggunaan dana desa. Kemendes PDTT.
- Kusumawati, R. (2024). Strategi Pengembangan Desa Digital Untuk Meningkatkan Literasi, Pelayanan Publik, dan Kemandirian Masyarakat di Jawa Barat. *Jurnal Governansi*, 10(1), 25–40.
<https://doi.org/10.30997/jgs.v10i1.9790>

- Mayyora, R., Sholihah, Q., Wanumawatie, I., & Wanto, A. H. (2025). Transformasi Digital Desa dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan: Pendekatan Literature Review. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(2), 100–111.
<https://doi.org/10.51577/ijipublication.v5i2.615>
- Rahmawati, A. D., & Suharto, D. G. (2024). Kesiapan Aparatur Desa Dalam Digitalisasi Untuk Mewujudkan Kemandirian Desa di Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 4, 73–89.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wardana, R. I., Putri, N. E., & Umar, G. (2025). Digitalisasi Pelayanan Publik: Solusi Atau Masalah Baru? *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)*, 5(2), 7933–7943.
<https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.1175>
- Wibisono, Y., Setiawan, W., Wahyudi, Y., Sobana, A., & Setiadiputra, D. (2021). Pengembangan Layanan Digital untuk Mendukung Program Desa Digital Developing Digital Services to Support Digital Village Program. *Jurnal Aplikasi Dan Teori Ilmu Komputer*, 4(1), 13–21. Retrieved from <https://ejournal.upi.edu/index.php/JATIKOM>
- Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Yunas, N. S., Susanto, A. H., & Kuswandoro, W. E. (2024). Penguatan Kapasitas Digital Leadership Bagi Aparatur Pemerintah Desa. *Surya Abdimas*, 8(3), 376–385.
<https://doi.org/10.37729/abdimas.v8i3.488Z>

LETTER OF ACCEPTANCE
Nomor: 72 /LOA/JPAP/V/2026

Tim Redaksi Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tulang Bawang Lampung, menerangkan bahwa artikel dengan judul:

***READINESS DESA DIGITAL:
STUDI DI DESA TUMBANG PENYAHUAN***

Penulis: Setianingsih¹⁾, Bagas Rizky Ardiansyah²⁾, Suprayitno³⁾, Subhan Ilham Thareq⁴⁾

^{1) 2) 3) 4)} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Palangka Raya

Telah diterima untuk diterbitkan pada Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP), (E-ISSN: 2777 - 0206), (P-ISSN: 2776 - 8511) Volume 6, No. 1, Mei 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jurnal Progress Administrasi Publik

Bandar Lampung, 13 Mei 2026.
Editor in chief


Hinfa Mosshananza, S.I.P., M.I.P.

INDEXED BY

